SIUPMB Perubahan

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Rekomendasi dari Kecamatan (Asli)	Wajib
2	Surat Penunjukan dari Distributor/Importir sebagai Penjual Langsung/Pengecer	Wajib
3	Scan Asli KTP Direktur	Wajib
4	Scan Asli NPWP Perusahaan	Wajib
5	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Wajib
6	Scan SIUP OSS	Wajib
7	Scan Akta Pendirian dan Akta Perubahan (jika ada perubahan) dan SK Menkumham	Wajib
8	Scan Bukti kepemilikan Tempat Usaha/Bukti Sewa Tempat Usaha/IMB	Wajib
9	Scan SKCK Asli	Wajib
10	Pas Foto 3x4 Berwarna	Wajib
11	Scan SPPL/UKL-UPL/AMDAL	Wajib
12	Scan Dokumen Pakta Integritas (Dengan Kop Surat, Stempel dan Materai) (Unduh Contoh Format Disini)	Wajib
13	Surat Kuasa (Jika Dikuasakan) serta KTP yang diberi Kuasa	Wajib
14	Scan Izin Asli (Jika Perubahan)	Wajib

Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum
1	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2	UU No. 29 Tahun 1947 tentang Cukai Dan Minuman Keras
3	PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4	PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terinegrasi Secara Elektronik
5	Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
6	Peraturan Menteri Perdagangan RI No: 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol
7	Perwako No. 56 Tahun 2016 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal
9	Peraturan menteri Perdagangan No. 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengasaan, Peredaran dna Penjualan Minuman Beralkohol
10	PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11	Permendag No. 36 tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan jo. Permendag No. 39 Tahun 2011
12	Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13	Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
14	Perda Kota Batam No. 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan, Pengawasan Dan

	Pengendalian Minuman Beralkohol Kota Batam
15	Perda Kota Batam No. 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa usaha Dan Retribusi Perizinan Tertentu
16	Perwako No. 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya
1	Golongan B: 2 (dua) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.	Rp. 7.500.000,00
2	Golongan C: 2 (dua) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.	Rp. 15.000.000,00